

DAFTAR PUSTAKA

- A SETIAWAN. (2016). Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Anak (Suatu Penelitian Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga Aceh Besar). *ETD Unsyiah*, 1(2), 168–179.
- Andi Sofyan, N. A., & Nuryaningsih. (2016). Buku Ajar Hukum Pidana. In K. Desain (Ed.), *Sentra Penelitian Engineering dan Edukasi* (Vol. 4, Issue 1). Pustaka Pena Press Anggota Anggota IKAPI Sul-Sel Jl. <http://speed.web.id/ejournal/index.php/Speed/article/view/226>
- Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 33. <https://doi.org/10.35586/jjur.v6i2.789>
- Carto Nuryanto. (2018). Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusannya Antara Kepastian Hukum dan Keadilan. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1), 71–84.
- Elisabert Maria Novena Nainggolan, & Ukas. (2019). *PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN TERHADAP PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA (STUDI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KOTA BATAM) In general , every process in an implementation that exists in Indonesia Based o.*
- Fajrin, Y. A., & Triwijaya, A. F. (2019). Arah Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia di Tengah Pluralisme Hukum Indonesia. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 18(1), 734–740. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i1.361>
- Flora, H. S. (2014). Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Dikaitkan Dengan Undang-Undang Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol.1(No. 1), 1–15.
- Hakim, L. (2019). *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA* (Vol. 148). CV Budi Utama.
- Haryono, H. (2018). Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lapas Terbuka dalam Proses Asimilasi Narapidana. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(3), 295. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.v12.295-311>
- Ida Bagus Surya Dharma Jaya, Darmadi, A. A. N. O. Y., Hariyanto, D. R. S., Hartono, M. S., & Purnawan, K. W. (2016). *Klinik Hukum Pidana* (Repro, I. P. Mertadana, & Diterbitkan (eds.)). Udayana Un?vers?ty Press.
- Indonesia, R. (1995). UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. In *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering ASCE* (Vol. 120, Issue 11). www.bphn.go.id

- Iqbal, M., Suhendar, & Ali Imron. (2019). *Hukum Pidana* (Taufik Kurrohman & F. A. Sugandar (eds.); Issue 1). Unpam Press.
- Iriani, D. (2016). Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial Dan Sistem Supremasi Penegakan Hukum. *Justicia Islamica*, 8(1). <https://doi.org/10.21154/justicia.v8i1.527>
- Ishaq. (2019). *Hukum Pidana* (Y. S. Hayati (ed.)). Rajawali Pers.
- Menkumham. (2018). *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan C. 893*, 1–9
- Muhammad Gazali Rahman. (2020). Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Al-Himayah*, 4(Vol. 4 No. 1 (2020): Al Himayah), 142–159. <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/1625>
- Oksep Adhayanto. (2014). *PERKEMBANGAN SISTEM HUKUM NASIONAL Oleh. 4(2)*, 22.
- Presiden Republik Indonesia. (1958). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP. In *Kementerian Kehakiman* (Vol. 5, Issue 1).
- Putra, A. R. A. A., & Puspita Sari, N. (2013). Kendala Pemberian Pembebasan Bersyarat Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen. *Jurnal Recidive*, 2(3), 280–289.
- r.Fitri Wahyuni. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia Cet.2* (M. R. Azmi (ed.)). a PT Nusantara Persada Utama.
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Rumadan, I. (2013). Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(2), 263. <https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.263-276>
- Sanusi, A. (2019). *PEMASYARAKATAN TERBUKA (Evaluation of Convicts Development In Open Correctional Institutions) Abstrak. 3*.
- Saputra, I. D. G. A. A. J., Widyantara, I. M. M., & Karma, N. M. S. (2019). Pelaksanaan Pemberian Hak Narapidana Mendapatkan Pembebasan Bersyarat (Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas Iia Kerobokan). *1(M)*, 300–305.

- Setyadi, S. (2018). EKSEKUSI NARAPIDANA ANGGOTA MILITER YANG DIBERHENTIKAN TIDAK HORMAT DARI DINAS MILITER. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(November), 5–24.
- Situmeang, S. M. T. (2020). Pembebasan Narapidana Dalam Perspektif Konsep Asimilasi Di Masa Pandemi Covid 19. *Litigasi*, 21(2), 220–237.
- Situmorang, V. H. (2019). Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1), 85. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.85-98>
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan* (B. Alfabeta (ed.)). Alfabeta, Bandung.
- Surbakti, sudaryono N. (2017). HUKUM PIDANA Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP. In *Muhammadiyah University Press* (Vol. 39, Issue 2).
- Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA.
- Ula, S. T. (2014). Makna Hidup Bagi Narapidana. *Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam*, 11(1), 15–36. <https://doi.org/10.14421/hisbah.2014.111-02>
- Wulandari, S. (2012). EFEKTIFITAS SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP TUJUAN PEMIDANAAN. *EFEKTIFITAS SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP TUJUAN PEMIDANAAN*, 9(0854), 131–142.
- Yuwanta, V. M., & Airlangga, U. (2019). *Jurist-Diction*. 2(4), 1479–1496.